

Pengusaha Bakal Gugat Anies Soal Kenaikan UMP

JAKARTA (IM) - Para pengusaha bakal menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022. Pengusaha menargetkan gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bisa selesai dan dikirim pada pekan ini.

"Kami mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakannya. Salah satunya gugatannya itu membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada berita acaranya," tuturnya.

"Rekomendasi ini sidang lho ya bukan rapat. Harus sidang yang benar itu kan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada berita acaranya," tuturnya.

Kemudian, selain melanggar mengenai penentuan kenaikan UMP, Anies juga dinilai telah melanggar aturan dari pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya perusahaan adalah regulasi sedangkan pemerintah pusat regulatornya. Pemerintah seperti Gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kok bisa melanggar aturan yang ada dibuat oleh pemerintah pusat," tutupnya.

Dalam gugatan tersebut, pengusaha mengaku cukup hati-hati dan tidak ingin terburu-buru. "Tidak sebagaimana Pak Gubernur DKI Jakarta yang terburu-buru dalam menetapkan Keputusan 1517," ucapnya.

Gugatan itu diajukan karena menurut pengusaha aturan yang dilayangkan Anies yakni (Keppub) yakni Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022, telah melanggar aturan. Adapun proses mengenai kebijakan penetapan UMP setiap provinsi harus melalui rekomendasi dari sidang Dewan Pengupahan.

"Rekomendasi ini sidang lho ya bukan rapat. Harus sidang yang benar itu kan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada berita acaranya," tuturnya.

Kemudian, selain melanggar mengenai penentuan kenaikan UMP, Anies juga dinilai telah melanggar aturan dari pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya perusahaan adalah regulasi sedangkan pemerintah pusat regulatornya. Pemerintah seperti Gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kok bisa melanggar aturan yang ada dibuat oleh pemerintah pusat," tutupnya.

Dalam gugatan tersebut, pengusaha mengaku cukup hati-hati dan tidak ingin terburu-buru. "Tidak sebagaimana Pak Gubernur DKI Jakarta yang terburu-buru dalam menetapkan Keputusan 1517," ucapnya.

Kasus Aktif Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 364 dalam 14 Hari Terakhir

JAKARTA (IM) - Kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah sebanyak 364 kasus dalam 14 hari. Adapun 14 hari itu terhitung mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta cenderung fluktuatif. Oleh karena itu, ia mengimbau tetap menerapkan protokol kesehatan, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap lakukan testing, tracing dan treatment Covid-19.

Berikut data perkembangan kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir: - 20 Desember: Tambah 17 kasus, 281 kasus

aktif - 21 Desember: Tambah 35 kasus, 316 kasus aktif - 22 Desember: Tambah 17 kasus, 281 kasus aktif - 23 Desember: Turun 36 kasus, 302 kasus aktif - 24 Desember: Tambah 40 kasus, 342 kasus aktif - 25 Desember: Tambah 35 kasus, 377 kasus aktif - 26 Desember: Tambah 23 kasus, 400 kasus aktif - 27 Desember: Turun 46 kasus, 354 kasus aktif - 28 Desember: Tambah 53 kasus, 407 kasus aktif - 29 Desember: Turun 4 kasus, jadi 403 kasus aktif - 30 Desember: Tambah 19 kasus, 422 kasus aktif - 31 Desember: Tambah 65 kasus, 487 kasus aktif - 1 Januari 2022: Tambah 60 kasus, 547 kasus aktif - 2 Januari 2022: Turun 3 kasus, 544 kasus aktif. ● yan



WAKSINASI COVID-19 DI HARI PERTAMA PTM

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 ke murid sekolah dasar (SD) di SDI Al Azhar 5 Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (3/1). Pada hari pertama pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilaksanakan secara 100 persen tersebut pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Kebayoran Lama memberikan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh murid.

BANTAH PERNYATAAN MENDAGRI

Riza Patria: Tak Ada APBD DKI yang Diendapkan di Bank

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait endapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 12,953 triliun di bank umum. "Tidak ada yang mengendap," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/1).

Dia menjelaskan, uang belasan triliun rupiah yang tersimpan di bank merupakan uang bagi hasil dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Pemprov DKI mendapat uang bagi hasil sebesar Rp 5 triliun yang pembayarannya ditunda. Pembayaran dilakukan pada 17 Desember 2021. "Beberapa hari sebelum tahun baru masuk lagi Rp 3 triliun jadi kita di ujung (tahun 2021) masuk lagi," kata dia.

Uang Rp 8 triliun tersebut tidak bisa dibelanjakan karena sudah memasuki akhir tahun, sehingga kemudian disimpan di bank. Sisanya, Riza tidak menjelaskan uang yang disimpan di bank merupakan APBD atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Namun, terkait APBD, kata Riza, DKI Jakarta berhasil menyerap sebesar 88,2 persen dari target 91 persen. Menurut dia, serapan APBD

88,2 persen merupakan angka yang tinggi. Serapan anggaran tidak mencapai target karena tiga hal, yaitu karena efisiensi yang terjadi, ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, terakhir karena menunggu proses audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, Riza memastikan tidak ada program strategis yang tertunda akibat efisiensi dan proses audit.

"Alhamdulillah program yang strategis terlaksana dengan baik," kata Riza. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan ada sepuluh pemprov dengan simpanan kas daerah tertinggal.

Provinsi yang memiliki simpanan tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan angka Rp 12,95 triliun.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kami sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito, Senin (27/12).

Tito mengatakan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak. Terlebih lagi, kata Tito, ada dana yang didepositokan. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



PELAKSANAAN PTM 100 PERSEN DI JAKARTA

Siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN 08 Kenari Jakarta, Senin (3/1). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Wagub DKI Punya Peluang Besar Maju Jadi Cagub Jakarta 2024

Untuk membicarakan calon gubernur masih terbilang sangat dini. "Tapi kalau ditanya yang punya peluang besar siapa? Ya tentu saja pertama ya, kalau sekarang sih Pak Ahmad Riza Patria, karena dia Wagub," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.

JAKARTA (IM) - Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan sosok Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) memiliki peluang sangat besar untuk maju sebagai calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2024. Dengan catatan Anies Baswedan memutuskan tak maju kembali dalam Pilkada mendatang.

Hal itu diungkapkan Di-

rektur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo merepons munculnya nama seperti Riza Patria, mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmy Diany, hingga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Nama-nama ini muncul karena usulan dari Penasihat Fraksi Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik.

Kunto menuturkan, sebenarnya untuk membicarakan

calon gubernur masih terbilang sangat dini. Sehingga, dengan melihat nama-nama yang muncul, Kunto beranggapan semuanya memiliki peluang yang sama.

"Tapi kalau ditanya yang punya peluang besar siapa? Ya tentu saja pertama ya, kalau sekarang sih Pak Ahmad Riza Patria punya peluang besar karena dia Wagub," kata Kunto, Senin (3/1).

Hanya saja, kata dia, masa jabatan akan menjadi sebuah persoalan besar bagi politikus Gerindra tersebut. Sebab, kata dia, setelah turun jabatan di tahun 2022, maka Ariza kemungkinan akan kehilangan panggung politiknya.

"Apakah dia bisa mempertahankan eksistensinya setelah turun di 2022 ini sampai 2024, dua tahun kosong tanpa jabatan," ujarnya.

Sementara, kata dia, bakal calon lain dari kalangan men-

teri seperti Bahlil Lahadalia atau bahkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga dinilai memiliki peluang yang cukup besar.

Sebab, jika Presiden Jokowi masih meminta keduanya untuk terus berada dalam kabinet, maka bakal calon dari kalangan menteri ini akan tetap mendapat panggung politik hingga 2024 mendatang.

Sedangkan, sosok Airin Rachmy serta sejumlah nama dari unsur mantan atau yang masih menjabat sebagai kepala daerah juga masih memiliki

peluang untuk menduduki kursi orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut. Hanya saja, mereka harus mampu menjelaskan kepada masyarakat jika nantinya memimpin Jakarta akan jauh lebih baik dibanding mereka memimpin daerah sebelumnya.

"Jakarta punya kompleksitasnya sendiri, dan perlu meyakinkan warga Jakarta bahwa dia punya kemampuan, kapabilitas, kompetensi yang diinginkan warga Jakarta untuk menjawab persoalan-persoalan di Jakarta," ucapnya. ● yan

M Taufik Ungkap Kendala yang Dihadapi Anies Maju Capres 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai langkah Anies Baswedan untuk maju dalam pencalonan presiden 2024 lebih berat dibanding pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Anies harus mencari partai politik terlebih dahulu jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden.

"Langkah yang paling gampang ya gubernur, karena gubernur ada independen. Sementara dia bukan pemimpin partai enggak punya partai, kalau calon presiden mesti diusung partai politik sesuai threshold, artinya stepnya lebih sulit, mesti cari dulu," katanya saat dikonfirmasi, Senin (3/1).

Kendati demikian, dia mengakui kepemimpinan Anies masuk dalam kriteria calon presiden. Taufik pun tidak meragukan kualitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Kalau kualitasnya saya bilang levelnya sudah level presiden cuma untuk ke sana dia harus ada satu langkah lagi," jelasnya.

Sementara itu diketahui masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada Oktober 2022.

Anies dilantik pada 17 Oktober 2017 silam. Dia menjadi salah satu tokoh nasional yang diproyeksikan akan menjadi calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ele-

ktabilitas Anies masih terus bersaing dengan sejumlah tokoh lain.

Dalam sebuah kesempatan, Penggagas Indonesia Mengajar itu mengaku ingin keliling Indonesia setelah masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta habis pada 2022. Hal itu disampaikan saat workshop Partai Amanat Nasional (PAN).

Anies mengatakan, untuk saat ini belum memiliki rencana lain hanya ingin menuntaskan amanah sebagai gubernur.

"Jadi yang ada dalam benak saya sekarang adalah, ini (jabatan gubernur) dituntaskan, bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat, amanah nah ini namanya sama nih (menunjuk logo PAN), amanah sudah dijalankan dengan baik, tuntas," ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10).

Namun, setelah tidak lagi memiliki jabatan, Anies menjadi manusia bebas. Ia ingin berkeliling ke seluruh Indonesia.

"Nah sesudah itu saya jadi orang bebas, orang bebas. Sambal saya orang bebas, saya menikmati keliling kemana-mana, jadi saya ingin kalau boleh kemarin kan tahanan kota lima tahun, jadi abis itu kalau sudah ya saya keliling aja, kemana-mana di Indonesia," ujar Anies. ● yan

Waspada Omicron, Pemkot Bekasi Wajibkan Pelaku Perjalanan Tes PCR

BEKASI (IM) - Pemkot Bekasi mewajibkan warganya untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR di fasilitas kesehatan di Kota Bekasi setelah melakukan perjalanan. Hal tersebut termaktub dalam Surat Edaran 440/2021/SET/COVID-19 tertanggal 31 Desember 2021.

Kasubag Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sajekti Rubiah mengatakan, edaran tersebut diteken berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2021. Adapun Surat Edaran juga ditujukan kepada Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas yang ada di Kota Bekasi.

"Seluruh pelaku perjalanan baik Nasional maupun Internasional diwajibkan untuk melakukan PCR di fasilitas kesehatan (Puskesmas terdekat)," kata Sajekti, Senin (3/12).

Khusus bagi pelaku perjalanan Internasional juga

wajib menunjukkan hasil PCR sebelum keberangkatannya dalam kurun waktu 3x24 jam. Nantinya, setelah sampai di Kota Bekasi, warga akan kembali diperiksa dan menjalani karantina. "Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 7x24 jam," jelasnya.

Sajekti mengatakan, semua penanggung jawab wilayah Camat dan Lurah turut memantau kedatangan pelaku perjalanan. Kemudian, hasil pemantauannya diserahkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan tentang hasil tracing pelaku perjalanan setiap hari. Dan warga Bekasi wajib waspada di Covid-19 varian Omicron, karena jumlah yang terpapar di DKI kembali meningkat," tutupnya. ● yan

10.429 Sekolah di DKI Gelar PTM Kapasitas 100 Persen

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat, 10.429 sekolah di Ibu Kota melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen pada awal 2022. "Sebanyak 10.429 sekolah atau sekitar 97,2 persen. Ini sesuai SKB empat menteri, juga ketentuan dari dinas terkait," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/1).

Kebijakan PTM dengan kapasitas 100 persen itu merujuk kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri pada 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Kemudian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menerbitkan aturan turunan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala

Dinas Kesehatan Nomor 1363 Tahun 2021. PTM dengan kapasitas 100 persen itu juga sekaligus menjadi yang pertama setelah hampir dua tahun melaksanakan pembelajaran secara daring (online) dan beberapa bulan terakhir melaksanakan PTM terbatas pada sejumlah sekolah di wilayah DKI.

Menurut Riza, sejumlah indikator dapat mendukung PTM dengan kapasitas 100 persen di Jakarta, antara lain pencapaian vaksinasi yang sudah mencapai 120 persen hingga ketersediaan tempat isolasi, dan ruang perawatan kasus Covid-19. Meski begitu, Riza mengingatkan, masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena muncul varian Omicron. "Tidak berarti kita lupa, tetap waspada hati-hati jangan euforia," ucap Riza.

Terkait ketentuan dalam pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen itu, lanjut Riza, juga masih sama dengan ketentuan PTM terbatas sebe-

lumnya di antaranya vaksinasi peserta didik dan tenaga pendidik serta disinfektan. "Semua yang sekolah (vaksinasi) sudah mencapai dosis kedua, tenaga pendidik juga tidak boleh kurang dari 80 persen bahkan lansianya juga harus di atas 50 persen," ujar Riza.

Dia juga berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya terutama saat jam pulang sekolah dan memastikan siswa langsung pulang ke rumah untuk mengantisipasi penularan di luar sekolah. Dia menjelaskan kasus positif Covid-19 sempat muncul ketika dilaksanakan PTM sebelumnya yang dipicu anak-anak sekolah tidak langsung pulang ke rumah.

"Yang lebih penting lagi perjalanan dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Mohon semua orang tua monitor dan memantau karena kami tenaga pendidikan memiliki keterbatasan, semua bergantung pada kita semua dan utamanya orang tua," tutur Riza. ● yan



TARGET PENUMPANG MRT JAKARTA TAHUN 2022

Penumpang menaiki MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Senin (3/1). PT MRT Jakarta (Persero) menargetkan pada tahun 2022 angka keterangkatan penumpang mencapai 14,6 juta orang atau setara dengan sekitar 40 ribu orang per hari.